

Implementasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango

Rusni Ente¹, Ellys Rachman², Lisdavangobel³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Administrasi Publik
Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Rusni Ente, e-mail: rusni.ente05@gmail.com¹, ellysrachman12@gmail.com², Lisdavangobel6@gmail.com³

Published: July, 2025

ABSTRACT

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata lombongo oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango dan juga mengetahui faktor-Faktor Penghambat Proses Implementasi Kebijakan Pengembangan destinasi wisata lombongo oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bone Bolango Metode yang digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan melibatkan 9 orang informen yang terdiri dari pegawai dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten bone bolango berjumlah 6 orang, 1 orang sebagai kepala desa lombongo dan 1 orang masyarakat serta 1 orang pengujung destinasi wisata lombongo. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata lombongo oleh dinas pariwisata Kabupaten Bone Bolango, belum efektif antara pemerintah dan masyarakat dilihat dari aspek baik dari komunikasi, sumber daya disposisi, struktur maupun dari faktor penghambat implementasi kebijakan, dimana dari faktor penghambat masih kurangnya peran aktif dari pemerintah, partisipasi masyarakat, swasta, anggaran, serta promosi dalam pengembangan destinasi wisata lombongo, meskipun sumber daya penunjang sudah baik hal ini dapat dilihat dari keberadaan potensi yang dimiliki oleh kawasan destinasi wisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan daerah (PAD).

Keywords: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Destinasi Wisata

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan keanekaragaman sumber daya alam dengan berbagai destinasi wisata baik dari segi destinasi bahari maupun ekowisata yang menarik berupa fitur-fitur budaya, seni, sejarah terpenting, keanekaragaman potensi-potensi yang dimiliki menjadi daya tarik tersendiri, oleh sebab itu untuk diperlukan pelestarian dan pengembangan destinasi obyek wisata dari pihak terkait secara berkelanjutan (Latala et al., 2024; Windasai et al., 2021). Pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menggali potensi-potensi yang dapat membantu baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat di kawasan destinasi wisata sekitarnya, Salah satu sektor kepariwisataan membantu peningkatan perekonomian terhadap pembangunan suatu daerah, tentunya dalam pengembangan sektor kepariwisataan seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana Penunjang destinasi wisata sebagai nilai tambah wisatawan yang akan berkunjung.

Nomor 10 Tahun 2009 pasal 33 tentang kepariwisataan, dimana pelestarian dan pengembangan destinasi wisata merupakan aset nasional dan menjadi daya tarik destinasi wisata. Perkembangan potensi destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo sangat besar dan memiliki berbagai keaneka ragaman destinasi wisata yang unik dan menarik seperti 71

wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya dan 15 wisata religi, 20 wisata sejarah dan wisata minat khusus. Dari sisi akomodasi, memiliki 59 hotel 24 penginapan, 27 *homestay*, 229 rumah makan serta 61 restoran dan 47 kefe, meskipun pemerintah daerah memiliki destinasi wisata cukup dan rutin menyelenggarakan even-even pariwisata untuk mempromosikan potensi kepariwisataan yang tersebar di kabupaten dan kota, bahkan masuk pada kalendeKharisma Even Nusantara (Adam et al., 2022). Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun pengembangan potensi destinasi wisata masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan terkait baik ketersediaan sumber daya manusia, anggaran serta peran pemerintah dinilai belum optimal dalam mendorong pengembangan destinasi wisata, serta belum adanya kolaborasi lintas sektor terkait, diantaranya pihak kementrian, dinas perhubungan, kementrian lingkungan hidup.

Potensi destinasi wisata di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo akan mendorong peningkatan pendapatan daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat di kawasan destinasi wisata jika dikelola dengan baik (Ali et al., 2023; Rachman, 2016; Podungge et al., 2025). Salah satu daerah yang memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik terdapat daerah Kabupaten Bone Bolango baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 destinasi wisata berjumlah 55 jenis, terdiri dari 3 (tiga) kelompok wisata, yaitu 40 wisata alam (*ecotourism*), 10 wisata alam bahari dan 5 wisata.

Adapun destinasi wisata tersebar di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Salah satu destinasi wisata yang sudah cukup lama beroperasi sejak tahun 1989 dan memiliki lahan dengan luas 32 hektar tepatnya di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dapat ditempuh lebih kurang 34 menit dari pusat kota, baik menggunakan roda dua maupun roda empat tiba dilokasi obyek wisata lombongo, adapun keunikan destinasi wisata lombongo mempunyai keunggulan yang cukup terkenal dengan air panas dan air dingin serta pemandangan alam hutan serta pengunungan yang telah dikenal oleh masyarakat baik masyarakat di Kabupaten Bone Bolango maupun masyarakat pada umumnya.

Keunggulan cukup terkenal tersebut bersumber dari air terjun berasal dari Kawasan hutan lindung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, yang merupakan perpaduan antara kawasan hutan (Taman Nasional) dan Kawasan Area yang ada di destinasi wisata lombongo, dengan keunggulan yang menarik, maka pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango telah berupaya melakukan pengembangan dengan merevitalisasi sarana dan prasarana akibat terjadi banjir bandang sejak tahun 2007, yang mengakibatkan kerusakan berat bangunan *homestay* yang dibangun serta mempengaruhi tingkat kenyamanan pengunjung ketika cuaca akibat hujan yang sering datangnya tiba-tiba.

Pengembangan destinasi obyek wisata Lombongo antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 telah berupaya merenovasi fasilitas kolam renang dan dengan anggaran sebesar Rp. 795.999.000. Selanjutnya di tahun 2022 dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupate Bone Bolango merencanakan akan melakukan pengembangan destinasi wisata Lombongo terhadap pengembangan pada beberapa lokasi dimana salah satu lokasi wisata alam lombongo, sesuai PERDA Kabupaten Bone Bolango Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango (RIPPDA) 2011-203.

Destinasi Lombongo sangat membutuhkan perhatian terhadap pemeliharaan hal ini mempengaruhi jumlah pengunjung tempat wisata ini terus mengalami penurunan, selain persoalan pemeliharaan, hal lain yang perlu diperhatikan karena destinasi wisata lombongo yang merupakan kawasan objek wisata lombongo yang menjadi taman nasional dan kawasan agrowisata masih menjadi kewenangan dari beberapa instansi masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yakni Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga Bone Bolango bertanggung jawab terhadap pada pengembangan dan pengelolaan wisata ditingkat lokal, termasuk dalam mempromosikan serta infrastruktur pendukung dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, sedangkan taman nasional sebagai penanggungjawab utama dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) melalui sumber daya alam dan ekosistem (KSDAE), disisi lain untuk kawasan agrowisata dimana

kementerian atau Dinas Pertanian setempat bertanggungjawab atas pengembangan agrowisata tersebut.

Meskipun penanggungjawab dari beberapa instansi terkait, namun destinasi wisata lombongo memiliki keunikan tersendiri dan menarik yakni terdapat permandian air panas maupun air dingin, namun dikawasan destinasi wisata lombongo ada pula yang menarik adanya suasana alam pengunungan relatif dingin serta potensi flora, satwa liar, burung, monyet, serta keberadaan destinasi wisata telah dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasana (balai pertemuan, homestay dan bangunan-bangunan penunjang lainnya. Akan tetapi animasi masyarakat untuk berkunjung ketempat destinasi wisata lombongo sangat tinggi karena memiliki sumber daya baik alami maupun buatan manusia, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir pengunjung mulai berkurang (Rachman & Thalib, 2024; Wiranto et al., 2024). Hal ini terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. Data Kunjungan Wisata Selang 3 Tahun
Tahun 2022 - 2024

No.	T a h u n	J u m l a h	Ket.
1	2022	8723	
2	2023	4228	
3	2024	4202	
Jumlah		17153	

Sumber Data : Dinas Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah kunjungan destinasi wisata lombongo pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 8723 orang, kemudian pada tahun 2023 mulai mengalami penurunan dengan jumlah pengunjung 4228 orang sampai pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan 2022 belum mengalami kenaikan. Hal disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan fasilitas penunjang dan sumber daya serta promosi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George Edward III, dimana pada penelitian ini menggunakan empat factor penentu, meliputi komunikasi,sumber daya,disposisi, struktur serta factor penghambat yang meliputi peran,masyarakat,swasta,anggaran dan promosi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada destinasi wisata lombongo.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari pihak terkait yakni saat melakukan wawancara dengan informan dan observasi destinasi wisata lombongo, yakni Kepada Dinas, Kepala Bidang Pariwisata,Kepala Bidang Ekonomi Kreatif,Pengelola Destinasi Wisata Lombongo, Penjabat Kepala desa lombongo, Masyarakat, dan pengujung destinasi wisata lombongo.,Sedangkan data sekunder yaitu sumber yang diperoleh secara langsung,baik melalui buku yang relevan maupun jurnal maupun situs internet.

Tinjauan Pustaka

Administrasi

Secara etimologis, kata “administrasi” berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu ada yang berarti intenseif, dan *administrare* yang bermakna melayani, membantu, atau memenuhi, jika digabungkan, istilah ini dapat diartikan sebagai “melayani secara intensif.” Di Indonesia, istilah administrasi sering disebut sebagai “Tata Usaha,” merujuk pada pekerjaan sipil. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemerintahan yang terkait dengan tulis menulis, surat menyurat, atau sering disebut sebagai “pekerjaan sipil” (Malawat, 2022).

Menurut Atmosoedirdjo dalam bukunya “*Dasar-Dasar Office Management*”, dimana administrasi dapat dipahami dari tiga persepektif. (1) administrasi dalam arti institusional, yaitu mengacu pada kumpulan individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, (2) administrasi dalam arti fungsional atau tugas, yang mencakup semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk menetapkan tujuan itu sendiri, 3 (tiga) administrasi,

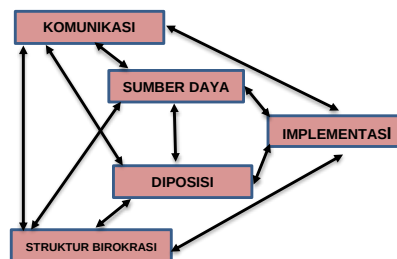
pemikiran, dan pengaturan, mulai dari penentuan tujuan hingga pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan tersebut (Muhammad Fitri Rahmadana et al., 2016).

Implementasi Kebijakan

Menurut (Mayasari et al., 2025) Implementasi merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan. Kebanyakan kebijakan yang dibuat, namun tidak dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap kehidupan negara. Gordon dalam (Pasolong, 2023), menyatakan dimana implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrasi mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Hal ini lebih dipertegas George Edward III, dalam Indihono, (Dwiyanto Indiahono, 2009) dinyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat pada empat aspek meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur.

Faktor Penentu Keberhasilan Model Implementasi Kebijakan



Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980:9) dalam Tahir A, 2015)

Dari keempat aspek keberhasilan implementasi kebijakan dapat di jelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Komunikasi, yaitu menekankan pada setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, ketika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran yang dapat disosialisasikan untuk secara baik untuk menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program; *Kedua*, Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial; *Ketiga*, Disposisi, yaitu menekankan pada karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan atau program; *Keempat*, Struktur birokrasi, menekankan pada struktur birokrasi agar menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata merupakan kerangka kerja digunakan dalam merencanakan dan mengelola pengembangan pariwisata berdasarkan pertimbangan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, dalam teori ini dinyatakan bahwa dalam industri pariwisata dapat membantu mengurangi dampak negatif pariwisata seperti kerusakan lingkungan, kerusakan budaya, dan ketimpangan ekonomi, sebab dalam penerapan teori pengembangan pariwisata, maka destinasi pariwisata akan berkembang secara berkelanjutan dan memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat di kawasan destinasi pariwisata (Inggolalo et al., 2023; Igrisa et al., 2023; Katili et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bone Bolango merupakan satu wilayah definitif sejak tanggal 16 Mei 2003 yang terletak di Provinsi Gorontalo melalui proses pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata lombongo di kabupaten bone bolango, disebabkan adanya keunggulan cukup menarik terkenal dengan berbagai

keindahan seperti adanya fasilitas sebagai penunjang destinasi wisata seperti tempat permandian yang memiliki perpaduan air dingin dan air panas yang bersumber dari kawasan hutan lindung, yang merupakan Taman Nasional, dan adanya sungai yang mengalir dengan air jernih bahkan adanya air terjun serta didukung oleh fasilitas infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat disekitar Kawasan destinasi lombongo.

Destinasi wisata lombongo merupakan destinasi wisata yang cukup lama beroperasi yakni sejak tahun 1989 dan memiliki lahan 32 hektar, tepatnya di desa lombongo kecamatan suwawa Kabupaten Bone Bolango yang dapat ditempuh lebih kurang 34 menit dari pusat kota. Potensi destinasi wisata lombongo mendorong perekonomian terhadap peningkatan padapatan daerah (PAD) dan peningkatan pendapatan masyarakat dikawasan destinasi wisata lombongo Keberhasilan Implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata lombongo di Kabupaten Bone Bolango tentunya adanya Faktor penentu terhadap pengembangan destinasi wisata lombongo, dengan adanya:

Komunikasi

Komunikasi merupakan komponen paling awal dan esensial dalam proses implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pengembangan destinasi wisata Lombongo, komunikasi berfungsi sebagai penghubung antarpihak, jembatan koordinatif antar sektor, dan sarana pembentukan pemahaman kolektif terhadap arah kebijakan pembangunan pariwisata. Ketepatan, kejelasan, dan kontinuitas komunikasi menjadi penentu utama tercapainya tujuan kebijakan, terutama dalam lingkungan multiaktor seperti kawasan wisata yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan komunitas lokal (Tirta et al., 2023).

Kebijakan pengembangan destinasi Lombongo, sebagaimana dikaji oleh (Sumaga et al., 2024), belum sepenuhnya berhasil membentuk arsitektur komunikasi yang efektif dan partisipatif. Penelitian mereka menunjukkan bahwa komunikasi antar lembaga pemerintah masih bersifat birokratis dan kurang responsif terhadap dinamika lapangan. Informasi yang disampaikan cenderung satu arah dan terbatas pada tahapan pelaksanaan, tanpa pelibatan maksimal dari masyarakat sejak tahap perencanaan. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realisasi kebijakan.

Minimnya strategi komunikasi berbasis komunitas juga menjadi faktor penghambat penguatan peran serta warga lokal. Dalam destinasi wisata berbasis ekologi dan budaya seperti Lombongo, nilai-nilai lokal dan norma sosial memiliki peranan penting dalam penerimaan atau penolakan kebijakan pembangunan. Ketika komunikasi dilakukan tanpa memperhatikan kearifan lokal dan struktur sosial masyarakat adat, maka potensi resistensi akan meningkat. Hal ini diperkuat oleh temuan (Sawir, 2021) yang menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam proses penyusunan kebijakan publik berbasis wilayah.

Selain komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dimensi koordinasi lintas sektor juga belum optimal. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memiliki forum koordinatif formal antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani pariwisata, infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi kreatif secara terpadu. Padahal, pengembangan destinasi wisata menuntut integrasi lintas sektor agar pembangunan bersifat holistik dan berkelanjutan. Ketiadaan sistem komunikasi terpadu ini menyebabkan tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan lemahnya monitoring terhadap kebijakan yang telah dijalankan.

Aspek komunikasi digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan wisata Lombongo. Di era industri pariwisata 4.0, kehadiran kanal informasi berbasis digital seperti media sosial, aplikasi reservasi, dan situs resmi destinasi menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan publik. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum secara maksimal memanfaatkan teknologi komunikasi ini sebagai bagian dari strategi implementasi. Akibatnya, penyebaran informasi mengenai potensi, fasilitas, dan agenda wisata Lombongo belum menjangkau target pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

Komunikasi juga memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan konflik yang mungkin timbul dalam proses pembangunan. Dalam kasus Lombongo, beberapa persoalan terkait pembebasan lahan, penataan ulang ruang usaha lokal, dan pengelolaan kawasan hutan lindung, dapat berpotensi

memicu konflik antar aktor. Tanpa strategi komunikasi yang antisipatif dan dialogis, konflik-konflik ini bisa menghambat implementasi dan menurunkan legitimasi kebijakan di mata publik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komunikasi yang adaptif dan berbasis resolusi konflik komunitas.

Efektivitas komunikasi juga berkaitan erat dengan legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa terlibat, didengar, dan dihargai dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, maka akan terbentuk rasa memiliki terhadap program pembangunan tersebut. Dalam hal ini, keberadaan forum musyawarah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan media komunikasi informal menjadi sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat melalui kanal-kanal ini tidak hanya memperkuat proses komunikasi, tetapi juga membentuk tata kelola kolaboratif berbasis kepercayaan.

Literatur administrasi publik menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya soal isi pesan, tetapi juga soal siapa yang menyampaikan, kepada siapa, dan dalam konteks apa pesan tersebut disampaikan (Keban, 2019). Dalam hal ini, kredibilitas aktor kebijakan seperti kepala daerah, kepala dinas, dan tokoh masyarakat menjadi sangat krusial. Ketika informasi kebijakan disampaikan oleh pihak yang dipercaya dan dihormati, maka peluang untuk diterima publik menjadi lebih besar. Ini menunjukkan pentingnya strategi pemetaan aktor dalam desain komunikasi kebijakan.

Kegagalan dalam membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan akan berdampak pada munculnya distorsi informasi, mispersepsi, dan bahkan boikot sosial terhadap program kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan sistem komunikasi yang sistematis dan dinamis harus menjadi prioritas dalam tahapan implementasi. Hal ini mencakup pembentukan unit komunikasi kebijakan di lingkup dinas pariwisata, penyusunan protokol komunikasi antar OPD, serta pelatihan komunikasi publik bagi pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan dan desa.

Olehnya, dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo harus dilihat sebagai mekanisme strategis, bukan sekadar aktivitas administratif. Ia berfungsi sebagai perekat sosial, instrumen koordinasi, serta medium partisipasi yang mendukung terwujudnya tata kelola destinasi wisata yang kolaboratif, transparan, dan inklusif. Ke depan, strategi komunikasi yang terdesain secara multidimensi dan berorientasi jangka panjang menjadi syarat mutlak dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber daya

Dalam kerangka implementasi kebijakan publik, ketersediaan sumber daya merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan. Edwards III menekankan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sebesar dan sebaik apa pun desain kebijakan tidak akan mampu dioperasionalkan secara efektif. Dalam konteks pengembangan destinasi wisata Lombongo, Kabupaten Bone Bolango menghadapi tantangan nyata dalam hal ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia, finansial, infrastruktur, serta teknologi informasi (Siregar, 2022).

Sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata Lombongo masih didominasi oleh pelaku lokal yang belum sepenuhnya terlatih secara profesional. Tenaga kerja pariwisata seperti pemandu wisata, petugas kebersihan, hingga operator promosi digital belum memiliki sertifikasi dan pelatihan formal yang memadai. Menurut penelitian (Tirta et al., 2023), kurangnya program pelatihan berbasis kompetensi menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan wisata di kawasan ini. Kondisi ini berdampak langsung pada citra destinasi dan kepuasan pengunjung.

Selain aspek SDM, alokasi anggaran untuk pengembangan wisata Lombongo juga belum mencerminkan prioritas pembangunan sektor pariwisata daerah. Banyak program yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan seperti RIPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) terhambat karena keterbatasan dana. Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan sering kali tidak dibarengi dengan dukungan fiskal yang proporsional. Padahal, pariwisata memerlukan investasi yang berkelanjutan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang memadai (Sumaga et al., 2024).

Sarana dan prasarana fisik di Lombongo seperti jalan akses, tempat parkir, sanitasi, ruang ganti, serta fasilitas evakuasi darurat masih perlu diperkuat. Infrastruktur yang buruk tidak hanya menurunkan daya tarik wisata tetapi juga berpotensi membahayakan pengunjung. Ini merupakan bentuk kegagalan dalam menyediakan sumber daya material yang menjadi prasyarat pengembangan

destinasi. Lebih lanjut, keterbatasan infrastruktur berdampak pada keterisolasian ekonomi masyarakat lokal dari arus wisatawan.

Sumber daya teknologi juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan pariwisata. Pemerintah daerah belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan Lombongo secara global. Padahal, tren pariwisata saat ini sangat dipengaruhi oleh visibilitas online, ketersediaan sistem pemesanan digital, dan pengelolaan data berbasis big data analytics. Tanpa teknologi, destinasi akan tertinggal dalam persaingan antar kawasan wisata lainnya, baik di tingkat regional maupun nasional (Sawir, 2021).

Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan sumber daya juga belum maksimal. Investasi dari pelaku usaha pariwisata masih rendah karena belum adanya kepastian regulasi serta insentif investasi dari pemerintah daerah. Kebijakan yang mendorong skema public-private partnership (PPP) masih bersifat normatif dan belum diimplementasikan secara konkret di tingkat tapak. Padahal, kolaborasi dengan swasta dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran publik.

Aspek penting lainnya adalah sumber daya sosial yang meliputi kepercayaan, partisipasi, dan jaringan komunitas. Dalam kasus Lombongo, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih perlu ditingkatkan agar mereka mau terlibat aktif dalam kegiatan wisata. Tanpa dukungan sosial yang kuat, kebijakan pengembangan hanya akan menjadi proyek sektoral yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara substantif. Kekuatan sumber daya sosial justru menjadi modal utama dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*).

Kebijakan pelatihan dan pendampingan yang sistematis terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal. Pokdarwis memiliki peran strategis dalam mengelola aktivitas wisata, mempromosikan budaya lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sayangnya, dalam banyak kasus, Pokdarwis hanya dijadikan simbol formalitas dalam pelaksanaan program, tanpa diberikan sumber daya dan kewenangan yang cukup (Tirta et al., 2023).

Penguatan sumber daya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Harus ada integrasi lintas sektor dan lintas program dalam perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah perlu membangun sinergi antara Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PUPR, dan instansi lainnya dalam mengembangkan kapasitas sumber daya secara terpadu. Integrasi ini akan menciptakan efisiensi kebijakan dan mempercepat akselerasi pengembangan destinasi Lombongo.

Secara keseluruhan, sumber daya bukan sekadar komponen pelengkap, melainkan prasyarat mutlak dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya manusia yang terlatih, anggaran yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, serta dukungan sosial dan teknologi, kebijakan pengembangan destinasi wisata akan mengalami stagnasi. Oleh karena itu, perlu ada komitmen kuat dari semua aktor untuk menjadikan penguatan sumber daya sebagai prioritas strategis dalam pembangunan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menjadi determinan penting dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas implementasi. Dalam kerangka Edwards III, disposisi mencakup komitmen, integritas, serta kesediaan untuk melaksanakan kebijakan secara substantif, bukan hanya administratif (Pasolong, 2019). Dalam kasus Lombongo, beberapa tantangan disposisional terlihat dari lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan dalam menjalankan perencanaan strategis kepariwisataan daerah.

Beberapa kebijakan pengembangan kawasan Lombongo seperti penyusunan masterplan wisata, pelatihan masyarakat sadar wisata, hingga pengembangan promosi digital, masih sering kali terhenti di fase awal tanpa keberlanjutan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi disposisi pelaksana yang belum terinternalisasi secara kolektif dalam institusi pelaksana.

Tirta et al. (2023) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan pariwisata di Bone Bolango cenderung tergantung pada inisiatif individu tertentu dalam birokrasi, bukan pada sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Ketika terjadi rotasi jabatan atau pergantian kepala daerah, banyak program tidak dilanjutkan karena lemahnya disposisi institusional.

Disposisi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas. Kegagalan pelaporan kinerja berbasis indikator dampak (impact indicators) menjadi bukti lemahnya budaya evaluatif dalam struktur pemerintahan lokal. Pelaksana cenderung berorientasi pada output administratif, bukan pada hasil substansial seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi lokal.

Peningkatan disposisi dapat ditempuh melalui reformasi kinerja birokrasi pariwisata, seperti penguatan reward system berbasis capaian dampak, penerapan e-kinerja, dan penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan wisata daerah berbasis RPJMD yang diselaraskan hingga level operasional desa.

Struktur

Struktur organisasi menjadi dimensi terakhir yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi di sektor pariwisata Kabupaten Bone Bolango masih bersifat hierarkis dan kurang fleksibel, sehingga memperlambat respons kebijakan terhadap dinamika lapangan (Keban, 2019). Dalam konteks destinasi Lombongo, struktur organisasi yang terlalu terpusat pada Dinas Pariwisata membuat desa wisata dan pelaku lokal memiliki ruang manuver yang terbatas.

Struktur kelembagaan ideal harus mendorong desentralisasi fungsional, di mana pemerintah desa dan komunitas wisata lokal diberi otoritas dalam mengelola aset wisata secara mandiri namun terkoordinasi. Konsep “pengelolaan berbasis kawasan” menjadi relevan diterapkan dalam pengembangan Lombongo, sebagaimana telah berhasil diimplementasikan di daerah seperti Banyuwangi dan Sleman (UNWTO, 2021).

Perlu juga dibentuk unit manajemen kawasan wisata yang otonom namun berada dalam pengawasan pemerintah daerah. Unit ini dapat berperan sebagai fasilitator, regulator teknis, sekaligus penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah. Model struktur ini akan menciptakan sistem koordinasi lintas sektor yang lebih tanggap, transparan, dan partisipatif.

Penting pula untuk menyelaraskan struktur kelembagaan dengan regulasi daerah, seperti Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RIPARDA Bone Bolango. Kesesuaian antara struktur pelaksana dan perangkat hukum akan memperkuat legitimasi pelaksanaan program-program strategis.

Penguatan struktur juga harus dilakukan melalui digitalisasi sistem pengelolaan destinasi. Dengan pemanfaatan teknologi, koordinasi antarunit dan akuntabilitas kebijakan akan menjadi lebih terukur. Struktur berbasis data real-time menjadi kunci manajemen destinasi wisata berbasis bukti (*evidence-based policy*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Lobongo yang telah berjalan dengan efektif, meskipun terlihat (1) faktor penunjang meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur dan (2) faktor penghambat yang meliputi peran pemerintah, masyarakat, swasta, anggaran, dan promosi, belum efektif karena dengan faktor-faktor tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial (pendapatan daerah (PAD) dan peningkatan masyarakat disekitar Kawasan destinasi wisata.

REFERENSI

- Adam, M. S., Rachman, E., & Van Gobel, L. (2022). Management of Trustworthy Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving Business and Economy through Community Empowerment of Koluwok Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency. *Management*, 1(7).
- Ali, S. H., Van Gobel, L., & Kadir, J. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif melalui Program Kota Kreatif di Kabupaten Bone Bolango. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9479–9487.
- Dwiyanto Indiahono. (2009). *Perbandingan Administarsi Publik, Model, Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Gava Media.
- Igrisa, A. G., Hamim, U., & Rachman, E. (2023). Manajemen Sterategi Pengembangan Objek Wisata Air

- terjun Botuliodu Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10962–10978.
- Inggolalo, H., Rachman, E., & Thalib, T. (2023). Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Alam Embung Hutadaa Di Desa Hutadaa Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2075–2082.
- Katili, S. D., Rachman, E., & Thalib, T. (2024). Pengelolaan Wisata Pantai Home Stay Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (PADES), Di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1857–1864.
- Latala, F. H. H., Arsana, I. K. S., Gintulangi, S. O., & Endey, N. (2024). Model Pengembangan Sektor Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Pesisir Teluk Tomini Berbasis Kearifan Lokal Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9699–9714.
- Malawat, S. (2022). *Pengantar Administrasi Publik* (Cetakan Pe). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Mayasari, N., Triana, N. N., Mulyadi, D., Dinarwati, S., Estiana, R., Soekirman, A., & Suhara, A. (2025). *Manajemen Sumber Daya Manusia Pengukuran Kinerja, Retensi Talenta, Dan Diversitas*. Penerbit Widina.
- Muhammad Fitri Rahmadana, A. T. M., Nurhayati Siagian, M. A. P., John Refelino, Moch. Yusuf Tojiri, V. S., Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, M. S., Devi Yendrianof, Anggri Puspita Sari, M. N. S., & Marlynda Happy Nurmawati Sari, S. B. (2016). Pelayanan Publik. In *Jakarta: Nimas Ultima*.
- Pasolong, H. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan*. Penerbit Alfabeta.
- Podungge, D., Rachman, E., & Hasan, K. K. (2025). Penataan Pedagang Kaki Lima di Area Taman Kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 1448–1454.
- Rachman, E. (2016). Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Terjun Bondula Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik*, 3(1), 1–7.
- Rachman, E., & Thalib, N. (2024). Penerapan Kebijakan Kendaraan Angkutan Orang dan atau Barang Berbadan Hukum oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo. *Publik*, 4(2), 70–77.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Deepublish.
- Siregar, N. (2022). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) Oleh. *JISOS Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 35–52.
- Sumaga, S. A., Nani, Y. N., & Tantu, R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI POTENSI WISATA PAMANDIAN LOMBONGO KABUPATEN BONE BOLANGO. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 500–511.
- Tirta, N., Sulila, I., & Isa, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango. *Publik. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10, 1267–1280.
- Windsai, W., Said, M. M., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793–804.
- Wiranto, M., Rachman, E., & Antu, Y. (2024). Pengelolaan Objek Wisata Pantai Bontolan Di Desa Bone Baru Banggai Laut Sulawesi Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 535–540.